



## **Audit kepatuhan atas penerapan PSAK 109 tentang piutang usaha PT Hyra Jaya Tbk sebagai klien KAP Sentra Audit dan Rekan**

### ***Compliance audit of the implementation of PSAK 109 regarding accounts receivable of PT Hyra Jaya Tbk as a client of KAP Sentra Audit and Partners***

**Hilda Tri Rachmawati, Yusna, Novrida Qudsi Lutfillah**

Program Studi Akuntansi Manajemen, Politeknik Negeri Malang, Indonesia

#### **Abstrak**

**Tujuan** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akuntansi piutang usaha PT Hyra Jaya Tbk, mengevaluasi prosedur audit dan kertas kerja pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KAP Sentra Audit dan Rekan, mengidentifikasi kendala atau temuan signifikan dalam audit kepatuhan terhadap penerapan PSAK 109, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan di masa mendatang.

**Desain/metodologi/pendekatan** – Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan supervisor auditor yang terlibat langsung dalam audit PT Hyra Jaya Tbk. Data sekunder diperoleh melalui observasi dan dokumentasi terhadap kertas kerja pemeriksaan, aging schedule, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan metode.

**Temuan** – Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi piutang usaha PT Hyra Jaya Tbk secara umum telah sesuai dengan PSAK 109 pada aspek pengakuan, klasifikasi, pengukuran awal, penyajian, dan pengungkapan. Namun, ditemukan ketidaksesuaian pada aspek penurunan nilai (Expected Credit Loss/ECL), di mana perusahaan tidak melakukan penambahan cadangan kerugian pada tahun 2025 karena menganggap cadangan tahun sebelumnya sudah cukup, sementara perhitungan auditor menunjukkan nilai ECL yang seharusnya diakui lebih besar. Kendala utama yang dihadapi auditor adalah keterbatasan data aging schedule yang disusun secara triwulanan, sehingga menghambat analisis pola kolektibilitas piutang secara mendalam dan penerapan pendekatan forward-looking.

**Keterbatasan penelitian** – Penelitian ini terbatas pada satu periode audit (tahun buku 2025) dan satu objek perusahaan (PT Hyra Jaya Tbk), sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas. Keterbatasan data historis piutang yang tersedia juga memengaruhi kedalaman analisis ECL.

**Implikasi** – Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi perusahaan untuk meningkatkan frekuensi monitoring piutang, penyusunan aging schedule secara bulanan, dan perhitungan ECL secara berkala. Implikasi teoritisnya adalah penelitian ini memperkaya literatur tentang implementasi PSAK 109 dan audit kepatuhan atas instrumen keuangan di Indonesia.

**Kebaruan** – Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan analisis kebijakan akuntansi, prosedur audit, dan perhitungan ECL dalam satu studi kasus pada perusahaan sektor teknologi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada prosedur audit secara atau aspek akuntansi piutang secara parsial, penelitian ini secara simultan mengevaluasi kesesuaian kebijakan akuntansi, prosedur audit, dan perhitungan ECL, serta mengidentifikasi kesenjangan spesifik antara ketentuan standar dan praktik di lapangan, terutama terkait ketersediaan data untuk pendekatan forward-looking.

**Kata Kunci:** Audit Kepatuhan, Expected Credit Loss, Piutang Usaha, PSAK 109, Prosedur Audit

**Abstract**

**Purpose** – This study aims to analyze the accounts receivable accounting policies of PT Hyra Jaya Tbk, evaluate the audit procedures and working papers conducted by KAP Sentra Audit dan Rekan, identify significant findings and challenges in compliance audits related to the implementation of PSAK 109, and provide recommendations to mitigate the risk of non-compliance in the future.

**Design/methodology/approach** – This study uses a qualitative descriptive approach with primary and secondary data sources. Primary data were obtained through in-depth interviews with the audit supervisor directly involved in the audit of PT Hyra Jaya Tbk. Secondary data were obtained through observation and documentation of audit working papers, aging schedules, financial statements, and other supporting documents. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing with source and method triangulation.

**Findings** – The findings indicate that PT Hyra Jaya Tbk's accounts receivable accounting policies generally comply with PSAK 109 in terms of recognition, classification, initial measurement, presentation, and disclosure. However, non-compliance was found in the impairment aspect (Expected Credit Loss/ECL), where the company did not add to the loss allowance in 2025 because it considered the previous year's allowance sufficient, while the auditor's calculation showed that the ECL should be higher. The main constraint faced by the auditor was the limited availability of aging schedule data prepared quarterly, which hindered in-depth analysis of receivable collectibility patterns and the application of the forward-looking approach.

**Research limitations** – This study is limited to one audit period (fiscal year 2025) and one company object (PT Hyra Jaya Tbk), so the results cannot be generalized widely. The limited historical receivable data available also affected the depth of ECL analysis.

**Implications** – This study provides practical implications for the company to increase the frequency of receivable monitoring, prepare aging schedules monthly, and calculate ECL periodically. The theoretical implication is that this study enriches the literature on PSAK 109 implementation and compliance audits of financial instruments in Indonesia.

**Originality** – This study contributes by integrating the analysis of accounting policies, audit procedures, and ECL calculations into a single case study of a technology sector company. Unlike previous studies, which generally focused only on audit procedures in isolation or on specific aspects of accounts receivable accounting, this study simultaneously evaluates the appropriateness of accounting policies, audit procedures, and ECL calculations, and identifies specific gaps between standard requirements and field practices, particularly regarding the availability of data for a forward-looking approach.

**Keywords:** Compliance Audit, Expected Credit Loss, Trade Receivables, PSAK 109, Audit Procedures

**Histori Artikel:**

Diterima: 9 Juli 2026, Direvisi: 10 Agustus 2026, Disetujui: 13 Agustus 2026, Dipublikasikan: 4 September 2026.

**\*Penulis Korespondensi:**

hildatri.rachmawati18@gmail.com

**DOI:**

<https://doi.org/10.60036/jbm.1382>

**PENDAHULUAN**

Laporan keuangan merupakan sarana utama bagi entitas untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum. Agar informasi tersebut dapat dipercaya, laporan keuangan harus melalui proses audit oleh auditor independen sebagai pihak ketiga yang memberikan jaminan atas kewajaran penyajian laporan keuangan (Aurelia & Batam, 2022). Audit memperkuat kredibilitas informasi dan memastikan bahwa penyusunan laporan telah sesuai dengan prinsip serta regulasi akuntansi yang berlaku. Bagi perusahaan yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, audit merupakan kewajiban hukum dan sekaligus bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada

publik dan regulator sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/PJOK.04/2022.

Salah satu tujuan audit adalah melakukan audit kepatuhan, yaitu memastikan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menjadi pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan. Kepatuhan terhadap PSAK penting untuk menjaga keandalan laporan keuangan dan meminimalkan potensi kesalahpahaman pengguna laporan, karena ketidakpatuhan dapat menurunkan relevansi informasi yang disajikan (Tanjung & Sihite, 2024).

Salah satu standar yang mengatur instrumen keuangan adalah PSAK 109 tentang Instrumen Keuangan, yang mengatur antara lain pengakuan dan pengukuran piutang usaha serta pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL). Dalam perkembangan standar akuntansi di Indonesia, PSAK 109 merupakan penomoran yang berlaku saat ini untuk menggantikan PSAK 71, sedangkan PSAK 71 sebelumnya merupakan standar yang menggantikan PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Dengan demikian, hubungan standar tersebut dapat dipahami dengan adanya perubahan penomoran yang dilakukan sebagai bagian dari pembaruan dan penyesuaian standar akuntansi keuangan di Indonesia.

PSAK 55 menggunakan pendekatan *incurred loss*, yaitu kerugian kredit pada dasarnya diakui ketika terdapat bukti bahwa peristiwa kerugian telah terjadi. Pendekatan tersebut dinilai kurang mampu memberikan informasi mengenai potensi kerugian kredit secara lebih dini, terutama setelah terjadinya krisis keuangan global tahun 2008 yang menunjukkan perlunya pengakuan risiko kredit secara lebih proaktif (Hidayat & Hardianto, 2022). Selanjutnya, melalui PSAK 71 dan kemudian PSAK 109 sebagai penomoran yang berlaku saat ini, pendekatan tersebut diperbarui dengan menggunakan model *Expected Credit Loss* (ECL). Pendekatan ECL bersifat prospektif karena memperhitungkan potensi kerugian kredit sejak awal berdasarkan informasi historis, kondisi saat ini, dan informasi perkiraan masa depan (*forward-looking information*). Oleh karena itu, penerapan ECL dinilai lebih mampu mencerminkan risiko kredit dan mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyajian laporan keuangan.

Penerapan PSAK 109 menjadi semakin penting di Indonesia seiring dengan banyaknya kasus penurunan kondisi keuangan perusahaan (Yunita & Indahwati, 2022). Contoh nyata adalah kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), di mana ketidakmampuan membayar kewajiban menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang memiliki piutang. Meskipun Sritex bergerak di sektor tekstil/manufaktur, kasus ini tetap relevan secara konseptual karena prinsip pengakuan kerugian kredit (ECL) bersifat universal dan berlaku untuk seluruh entitas yang memiliki piutang usaha, tanpa memandang sektor industrinya. PSAK 109 (instrumen keuangan) mengatur perlakuan akuntansi piutang untuk semua jenis entitas, baik sektor keuangan maupun non-keuangan, termasuk manufaktur, perdagangan, dan jasa teknologi. Dengan demikian, kegagalan Sritex dalam mengelola kewajiban dan piutangnya memberikan pelajaran penting bagi perusahaan di sektor teknologi bahwa risiko gagal bayar mitra bisnis dapat terjadi di industri mana pun, terutama ketika kondisi makroekonomi memburuk. Oleh karena itu, penerapan ECL secara tepat menjadi kebutuhan lintas sektor, termasuk pada perusahaan jasa teknologi dan digital yang menjadi objek penelitian ini. Kejadian ini menegaskan pentingnya pengelolaan piutang dan penerapan ECL agar risiko gagal bayar dapat diantisipasi sejak dini. Meskipun PSAK 109 telah mewajibkan ECL, pada praktiknya masih banyak perusahaan yang belum menerapkan metode tersebut secara optimal.

Penelitian ini dianalisis menggunakan dua kerangka teori utama. Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan antara manajemen (*agen*) dan pemilik/pemangku kepentingan (*prinsipal*), di mana terjadi asimetri informasi yang dapat mendorong manajemen untuk tidak

sepenuhnya mengungkapkan risiko kredit piutang. Audit independen berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi asimetri tersebut. Prinsip Kehati-hatian (*Prudence*) menjadi landasan kedua, mengingat ECL mensyaratkan pengakuan kerugian potensial lebih awal sebagai bentuk antisipasi risiko, bukan menunggu terjadinya gagal bayar. Kerangka teoritis ini menjadi lensa untuk menganalisis kesenjangan antara kebijakan formal perusahaan dan implementasi teknis di lapangan.

Hal ini tercermin dari sejumlah penelitian terdahulu yang menunjukkan kesenjangan antara ketentuan standar dan praktik perusahaan. Penelitian Sulistia & Meidawati (2024) menemukan prosedur audit piutang sudah sesuai standar, namun tidak menyinggung pengukuran kerugian kredit maupun penerapan PSAK 109 dan ECL. Putra (2020) menunjukkan bahwa beberapa entitas tidak melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang, sehingga nilai piutang dalam neraca menjadi lebih saji. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Taroreh & Runtu (2016) serta Kartini et al. (2023) yang menyatakan bahwa implementasi akuntansi berbasis standar masih belum optimal.

Penelitian ini menjadi relevan karena masih terbatasnya studi yang mengintegrasikan analisis kebijakan akuntansi piutang, prosedur audit kepatuhan, dan perhitungan ECL dalam satu kerangka penelitian, khususnya pada perusahaan *go public* di sektor teknologi. Mayoritas penelitian terdahulu masih bersifat parsial, Sulistia & Meidawati (2024) dan Hardiansyah & Trisnarningsih (2025) berfokus pada prosedur audit piutang, sementara Putra (2020) dan Juniasih & Marunduh (2025) lebih menekankan pada aspek akuntansi pencadangan tanpa mengaitkannya dengan prosedur audit yang dijalankan oleh KAP. Berdasarkan kerangka teori keagenan dan prinsip kehati-hatian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan akuntansi piutang usaha dengan PSAK 109 (Instrumen Keuangan), mengevaluasi prosedur audit dan kertas kerja pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KAP Sentra Audit dan Rekan, mengidentifikasi kendala atau temuan signifikan dalam audit kepatuhan terhadap penerapan PSAK 109, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan di masa mendatang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan prosedur audit kepatuhan atas penerapan PSAK 109 pada piutang usaha, khususnya terkait proses audit, penerapan standar akuntansi, serta kesesuaian praktik perusahaan dengan ketentuan yang berlaku (Sugiyono, 2020). Khusus untuk analisis perhitungan *Expected Credit Loss* (ECL), penelitian ini sejalan awal merancang pendekatan berbasis *roll rate* dan *loss rate*, bukan analisis regresi, dengan pertimbangan diantaranya, (a) jumlah periode data historis yang tersedia terbatas sehingga tidak memenuhi syarat minimum untuk analisis regresi yang andal, (b) model *roll rate* lebih sesuai untuk entitas non-keuangan dengan portofolio piutang yang relatif homogen, sebagaimana direkomendasikan dalam literatur dan praktik audit (Remenaric et al., 2018), (c) pendekatan *roll rate* secara luas digunakan dalam praktik audit untuk entitas dengan data historis terbatas dan diakui oleh standar sebagai metode yang dapat diterima.

Objek penelitian adalah sebuah perusahaan sektor jasa teknologi dan digital yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangannya. Nama perusahaan dan KAP telah disamarkan dengan nama samaran “PT Hyra Jaya Tbk” dan “KAP Sentra Audit dan Rekan” untuk menjaga kerahasiaan data klien sesuai kode etik profesi akuntan publik dan untuk melindungi informasi material yang bersifat sensitif bagi perusahaan publik. Anonimisasi ini tidak mengurangi validitas studi kasus karena fokus penelitian ini adalah pada evaluasi kepatuhan terhadap standar akuntansi, bukan pada identitas spesifik entitas. Pemilihan objek didasarkan pada relevansi industri teknologi yang memiliki karakteristik transaksi piutang dinamis serta kebutuhan penerapan standar akuntansi yang ketat.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan supervisor auditor KAP Sentra Audit dan Rekan yang terlibat langsung dalam audit PT Hyra Jaya Tbk. Wawancara dilakukan pada 11 April 2026 dengan pertanyaan terbuka yang mencakup kebijakan akuntansi piutang, prosedur audit, perhitungan ECL, serta temuan dan kendala yang dihadapi. Data sekunder diperoleh melalui observasi dan dokumentasi terhadap kertas kerja pemeriksaan (*audit working papers*), *aging schedule*, laporan keuangan, *general ledger*, *invoice*, faktur pajak, dan standar operasional prosedur perusahaan.

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam yang tidak tercantum secara eksplisit dalam dokumen tertulis. Observasi dilakukan dengan menelaah kertas kerja pemeriksaan pada area piutang usaha. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh bukti-bukti audit dan dokumen keuangan yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020). Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan pada informasi yang berkaitan dengan penerapan PSAK 109 pada akun piutang usaha. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel perbandingan, dan matriks temuan audit. Penarikan kesimpulan difokuskan pada evaluasi audit kepatuhan terhadap penerapan PSAK 109. Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi metode dengan membandingkan informasi dari tiga sumber data yakni, wawancara mendalam dengan supervisor auditor, observasi terhadap kertas kerja pemeriksaan dan dokumentasi terhadap hasil dokumentasi narasumber (*aging schedule*, laporan keuangan, *general ledger*, *invoice* dan SOP perusahaan). Triangulasi metode ini memungkinkan verifikasi silang antara pernyataan informan dan bukti dokumentasi tertulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Akuntansi Piutang Usaha PT Hyra Jaya Tbk

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kebijakan akuntansi piutang usaha PT Hyra Jaya Tbk adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan: Piutang usaha diakui pada saat perusahaan memiliki hak kontraktual untuk menerima kas dari pelanggan, yaitu ketika barang atau jasa telah diserahkan. Jurnal yang digunakan adalah Piutang Usaha (Dr), Penjualan (Cr), dan PPN Keluaran (Cr). Dokumen pendukung yang digunakan adalah *invoice* penjualan dan faktur pajak.
2. Klasifikasi: Piutang usaha diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) karena dimiliki dalam model bisnis untuk memperoleh arus kas kontraktual (*hold to collect*).
3. Pengukuran Awal: Piutang dicatat sebesar nilai wajar sesuai *invoice* yang diterbitkan.
4. Pengukuran Selanjutnya: Piutang diukur menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi yang disesuaikan dengan penerimaan kas dan penurunan nilai apabila terdapat risiko tidak tertagih.
5. Penyajian: Piutang usaha disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar dengan nilai neto setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, serta dipecah antara piutang pihak ketiga dan pihak berelasi.
6. Penurunan Nilai: Perusahaan menyusun *aging schedule* berdasarkan masing-masing *invoice* dan *term of payment* (TOP). Piutang yang telah jatuh tempo di atas 30 hari akan ditagih secara aktif, sedangkan piutang di atas 90 hari akan dievaluasi lebih lanjut. Namun, perusahaan tidak melakukan penambahan atau pengurangan cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun 2025 karena mengganggu cadangan tahun sebelumnya sudah cukup.

**Tabel 1.** Hasil Analisis Kebijakan Akuntansi Piutang Usaha PT Hyra Jaya Tbk

| Aspek                                    | Ketentuan PSAK 109                                                                                                                                       | Praktik PT Hyra Jaya Tbk                                                                                                 | Hasil        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pengakuan                                | Aset keuangan diakui ketika entitas menjadi pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen keuangan                                                         | Piutang diakui pada saat hak tagih timbul berdasarkan transaksi penjualan kredit                                         | Sesuai       |
| Klasifikasi                              | Piutang usaha yang memenuhi model bisnis “ <i>hold to collect</i> ” diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi | Piutang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi                             | Sesuai       |
| Pengukuran Awal                          | Pengukuran awal aset keuangan dilakukan sebesar nilai wajarnya                                                                                           | Piutang dicatat sebesar nilai transaksi dalam <i>invoice</i>                                                             | Sesuai       |
| Pengukuran Selanjutnya (Penurunan Nilai) | PSAK 109 mensyaratkan pengakuan ECL dengan mempertimbangkan data historis, kondisi saat ini, dan informasi <i>forward-looking</i>                        | Perusahaan tidak melakukan penambahan cadangan pada tahun 2025; auditor menemukan ECL yang seharusnya diakui lebih besar | Belum sesuai |
| Penyajian                                | Aset keuangan disajikan sebesar nilai tercatat setelah dikurangi penyisihan kerugian                                                                     | Piutang disajikan sebagai aset lancar dengan nilai neto setelah dikurangi cadangan                                       | Sesuai       |
| Pengungkapan                             | Entitas wajib mengungkapkan informasi risiko kredit, metode penurunan nilai, serta asumsi dan estimasi yang digunakan                                    | Perusahaan mengungkapkan kebijakan ECL, risiko kredit, dan cadangan kerugian dalam Catatan atas Laporan Keuangan         | Sesuai       |

Sumber: Data primer yang diolah (2026)

### Prosedur Audit dan Kertas Kerja Pemeriksaan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP Sentra Audit dan Rekan meliputi:

1. **Perencanaan dan Penilaian Risiko.** Auditor menilai risiko inheren (risiko tidak tertagihnya piutang), risiko pengendalian (kelemahan sistem internal), dan risiko deteksi (risiko auditor tidak menemukan kesalahan). Auditor memahami model bisnis dan pengendalian internal perusahaan sebelum merancang prosedur audit.
2. **Analytical Review.** Auditor melakukan *preliminary analytical review* dengan menghitung rasio perputaran piutang dan membandingkannya dengan periode sebelumnya. Perhitungan dilakukan dengan membagi penjualan kredit dengan rata-rata piutang usaha, kemudian dikonversi ke dalam hari. Hasil analisis menunjukkan rasio perputaran piutang relatif stabil.
3. **Aging Test.** Auditor melakukan pengujian ulang (*reperformance*) atas perhitungan tanggal jatuh tempo piutang berdasarkan tanggal *invoice* dan *term of payment*. Hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat perbedaan klasifikasi umur piutang yang signifikan antara perhitungan auditor dan data klien.
4. **Vouching.** Auditor melakukan *vouching* terhadap sampel transaksi dari setiap kelompok umur piutang (*bucket*) untuk memverifikasi keabsahan transaksi melalui pemeriksaan *invoice* dan faktur pajak. Hasil *vouching* menunjukkan seluruh sampel didukung oleh dokumen pendukung yang valid.
5. **Konfirmasi Piutang.** Auditor mengirimkan surat konfirmasi positif kepada pelanggan, dengan *full sample* untuk pihak berelasi dan sampel berdasarkan materialitas untuk pihak ketiga. Hasil konfirmasi menunjukkan sebagian besar saldo piutang sesuai dengan catatan perusahaan.

6. Asesmen ECL. Auditor melakukan perhitungan ECL dengan langkah-langkah: (1) pemahaman kebijakan perusahaan, (2) perhitungan *roll rate* berdasarkan data *aging schedule*, (3) perhitungan *loss rate* tiap bucket, (4) pemodelan estimasi *loss rate* menggunakan analisis regresi (meskipun dalam penugasan ini tidak dilakukan karena keterbatasan data), dan (5) perhitungan ECL dengan mengalikan saldo piutang dengan *loss rate*.

Berdasarkan perhitungan auditor, berikut adalah tabel hasil perhitungan ECL versi auditor.

**Tabel 2.** Hasil Perhitungan ECLversi Auditor

| <b><i>Aging bucket</i></b> | <b><i>Loss rate</i></b> | <b><i>Outstanding Balance</i></b> | <b><i>Expected Credit Loss</i></b> |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Belum jatuh tempo          | 0,24%                   | 22.208.733.933                    | 52.271.038                         |
| 1 – 30 hari                | 0,68%                   | 12.605.893.020                    | 86.287.437                         |
| 31 – 60 hari               | 2,42%                   | 1.625.797.674                     | 39.375.400                         |
| 61 – 90 hari               | 3,51%                   | 4.259.868.176                     | 149.422.870                        |
| >90 hari                   | 4,68%                   | 75.611.292.992                    | 3.536.277.306                      |

Sumber: Hasil observasi yang diolah (2026)

Tabel 1 menunjukkan bahwa total ECL yang seharusnya diakui menurut perhitungan auditor adalah Rp3.863.634.051, sedangkan perusahaan tidak membentuk cadangan pada tahun berjalan dan sudah memiliki saldo cadangan pada tahun sebelumnya sebesar Rp2.960.599.374, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp903.034.678. Selisih kurang tersebut diusulkan jurnal penyesuaian kepada manajemen agar sesuai dengan perhitungan auditor berdasarkan *roll rate* historis yang lebih akurat. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan perusahaan yang tidak menambah cadangan pada tahun 2025 didasarkan pada perhitungan yang kurang memadai secara kuantitatif dan tidak sepenuhnya mencerminkan risiko kredit aktual.

### Kendala atau Temuan Signifikan

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa kendala dan temuan signifikan:

1. Keterbatasan Data Historis. Data *aging schedule* hanya tersedia dan direkonsiliasi secara triwulanan, bukan bulanan. Hal ini menghambat auditor dalam melakukan analisis pola kolektibilitas piutang secara mendalam dan berkesinambungan, serta menghambat penerapan pendekatan *forward-looking* sesuai PSAK 109.
2. Frekuensi Monitoring Piutang. Perusahaan melakukan pengendalian dan pemantauan penerimaan piutang setiap tiga bulan sekali, yang dinilai kurang memadai dan dapat menyebabkan keterlambatan dalam mengidentifikasi *invoice* yang belum tertagih. Manajemen diharapkan dapat meningkatkan frekuensi pengendalian menjadi minimal bulanan agar monitoring piutang lebih tepat waktu.
3. Perhitungan ECL Tahunan. Perhitungan ECL dilakukan secara tahunan, bukan secara berkala selama periode berjalan, sehingga kurang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi maupun perubahan profil risiko pelanggan. Manajemen diharapkan melakukan perhitungan ECL secara berkala dalam periode berjalan agar estimasi kerugian kredit lebih relevan

### Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum PT Hyra Jaya Tbk telah menerapkan kebijakan akuntansi piutang usaha yang sesuai dengan PSAK 109 pada aspek pengakuan, klasifikasi, pengukuran awal, penyajian, dan pengungkapan. Hal ini sejalan dengan temuan Yunita & Indahwati (2022) yang menyatakan bahwa penerapan PSAK 71 pada PT Pelabuhan Indonesia telah sesuai standar pada aspek pengakuan dan pengukuran awal piutang.

Namun, ditemukan ketidaksesuaian pada aspek penurunan nilai (ECL). Perusahaan tidak melakukan penambahan cadangan kerugian pada tahun 2025 karena menganggap cadangan tahun sebelumnya sudah cukup, sementara perhitungan auditor menunjukkan nilai ECL yang seharusnya diakui lebih besar. Temuan ketidaksesuaian ECL ini sejalan dengan penelitian Putra (2020) dan Juniasih & Marunduh (2025), namun terdapat perbedaan penting dengan studi Sulistia & Meidawati (2024) dan Hardiansyah & Trisnaningsih (2025) yang justru menemukan bahwa prosedur audit piutang secara keseluruhan telah sesuai tanpa temuan material. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesesuaian prosedur audit tidak selalu menjamin tidak adanya temuan ketidakpatuhan karena temuan baru terungkap ketika auditor melakukan *reperformance* perhitungan ECL secara kuantitatif. Dengan kata lain, prosedur audit mungkin “sesuai secara formal” tetapi belum tentu efektif dalam mendeteksi ketidaksesuaian substansial, terutama dalam aspek yang memerlukan estimasi dan *judgment* profesional yang kompleks seperti ECL. Hal ini menjadi kontribusi spesifik penelitian ini dibandingkan studi-studi sebelumnya yang cenderung berhenti pada evaluasi prosedur tanpa mengukur efektivitasnya dalam mendeteksi kesalahan penyajian material.

Prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP Sentra Audit dan Rekan telah sesuai dengan standar audit yang berlaku, mencakup perencanaan, *analytical review*, *aging test*, *vouching*, konfirmasi, dan asesmen ECL. Hal ini sejalan dengan penelitian Hardiansyah & Trisnaningsih (2025) yang menunjukkan bahwa proses audit piutang usaha oleh KAP Djoko Soerjadi sudah sesuai dengan teori dan standar audit yang berlaku. Sulistia & Meidawati (2024) juga menemukan bahwa prosedur audit piutang usaha pada KAP “X” telah dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

Kendala utama yang dihadapi auditor adalah keterbatasan data *aging schedule* yang disusun secara triwulanan, yang menghambat analisis pola kolektibilitas piutang secara mendalam dan penerapan pendekatan *forward-looking*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah memiliki kebijakan akuntansi yang sesuai secara formal, implementasi teknis masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal ketersediaan data yang memadai untuk mendukung perhitungan ECL yang akurat. Temuan ini memperkuat penelitian Remenaric et al. (2018) yang menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan hanya menggunakan pendekatan individual atau pendekatan secara sederhana, sehingga kualitas pengungkapan cadangan piutangnya belum memuaskan.

Dari perspektif manajerial, diperlukan peningkatan frekuensi monitoring piutang, penyusunan *aging schedule* secara bulanan, dan perhitungan ECL secara berkala. Perusahaan juga perlu memperkuat integrasi sistem antara fungsi penjualan, keuangan, dan akuntansi untuk memastikan data yang dihasilkan akurat dan konsisten. Keterlibatan aktif manajemen puncak dalam proses evaluasi risiko kredit dan pembentukan cadangan kerugian akan meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan.

## SIMPULAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi piutang usaha PT Hyra Jaya Tbk pada umumnya telah sesuai dengan PSAK 109 dalam aspek pengakuan, klasifikasi, pengukuran awal, penyajian, dan pengungkapan. Namun, ditemukan ketidaksesuaian material pada aspek penurunan nilai (ECL), di mana perusahaan tidak menambah cadangan kerugian pada tahun 2025, sementara perhitungan auditor menunjukkan selisih kurang sebesar Rp903.034.678 (Tabel 2). Prosedur audit KAP Sentra Audit dan Rekan telah sistematis dan memadai secara formal, tetapi efektivitasnya dalam mendeteksi ketidakpatuhan ECL terbatas oleh ketersediaan data *aging schedule* triwulanan yang tidak memadai untuk analisis *forward-looking*. Kontribusi penelitian ini adalah memperkaya literatur tentang implementasi

PSAK 109 di Indonesia dengan menunjukkan bahwa kesesuaian prosedur audit secara formal tidak menjamin deteksi ketidakpatuhan substansial sebuah temuan yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya yang cenderung berhenti pada evaluasi prosedural tanpa pengukuran kuantitatif efektivitasnya.

### Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya mencakup satu periode audit (tahun buku 2025) dan satu objek perusahaan (PT Hyra Jaya Tbk), sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara luas. Keterbatasan data historis piutang yang tersedia juga memengaruhi kedalaman analisis ECL yang dapat dilakukan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan pada beberapa periode dan beberapa perusahaan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi PSAK 109 di Indonesia.

### Implikasi Penelitian

Implikasi praktis dari penelitian ini bersifat spesifik berdasarkan temuan kuantitatif yakni, perusahaan wajib melakukan penyesuaian cadangan ECL sebesar Rp903.034.678 untuk menyajikan piutang secara wajar. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan frekuensi monitoring piutang menjadi bulanan dan menyusun *aging schedule* secara bulanan untuk memungkinkan perhitungan ECL yang lebih akurat, serta melakukan perhitungan ECL secara berkala (kuartalan) agar estimasi kerugian kredit mencerminkan risiko terkini. Tanpa perbaikan ini, risiko kesalahan penyajian material pada laporan keuangan akan terus berulang di periode mendatang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, A. (2019). *Praktikum audit*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (16th ed., global ed.). Harlow, England: Pearson Education Limited.
- Audika, B., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Expected credit loss based on PSAK 71: A systematic literature review. *Proceedings of International Conference on Economics Business and Government Challenges*, 5(1), 240–244.
- Aurelia, V., & Batam, U. I. (2022). *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1115–1120. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.107>
- Citrahayu, Z., Umar, Z., & Fitrika, C. (2025). Analisis Expected Credit Loss (ECL) dalam Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Menurut PSAK 71 pada Perusahaan PT. Perta Arun Gas. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(2), 123–136. <https://doi.org/10.35384/jkp.v21i2.687>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., ... Waris, L. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin. Retrieved from <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Hardiansyah, D., & Trisnaningsih, S. (2025). Analysis Of Audit Procedures On Receivables at BHK Foundation By KAP Djoko Soerjadi. *International Journal Business, Management and Innovation Review*, 2(1), 01–17. <https://doi.org/10.62951/ijbmir.v2i1.32>
- Hidayat, A. R., & Hardianto, F. (2022). Lembaga Keuangan dan Kebijakan Publik Dalam Menangani Krisis Ekonomi Global. *Syntax Literate*, 7(10), 17710–17719. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13174>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Instrumen Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan – IAI.

- International Auditing and Assurance Standards Board. (2023). Handbook of International Quality Management, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements. New York, NY: IFAC.
- Juniasih, N. W., & Marunduh, A. P. (2025). Penerapan PSAK No. 71 tentang piutang pada kredit macet di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sarunta Waya. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi (JEKMA)*, 3(1), 70–78.
- Kartini, E., Mimbar, L., & Izrawati. (2023). Implementasi Akuntansi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Pada UMKM Krupuk di Kota Mataram. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 66–71. <https://doi.org/10.54712/aliansi.v6i1.258>
- Kurniawati, L. (2021). JURNALKU Volume 1 No. 3, September 2021 PENERAPAN PSAK 71 PADA PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT: TELAAH TEORI INSTITUSIONAL. 1(3), 234–250
- Putra, I. S. (2020). Analisis akuntansi piutang usaha terhadap laporan keuangan CV. Linggar Perdana Banjarmasin. *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 6(2), 210–217.
- Remenaric, B., Kenfelja, I., & Ivan, C. (2018). Binomial model for measuring expected credit losses from trade receivables in non-financial sector entities. *Ekonomski Vjesnik / Econviews*, 31(1), 125–135.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulistia, A. R. B., & Meidawati, N. (2024). Audit Atas Piutang Usaha PT X. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 21(1), 529–539. <https://journal.uui.ac.id/JABIS/article/view/33592>
- Tanjung, R., & Sihite, R. E. A. R. (2024). Analisis implementasi PSAK No.1 pada laporan keuangan PT. Angkasa Pura II. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 50–63.
- Taroreh, J. R., & Runtu, T. (2016). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada PT Mandiri Tunas Finance Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3), 125–134.
- Yunita, D. I., & Indahwati, R. (2022). Pengaruh penerapan PSAK 71 terhadap pencatatan, pengakuan, pengukuran dan penyajian cadangan penurunan nilai piutang pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Belawan. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 1–12.